IT & ELEKTRONIK

HP, GADGET, DIGITAL, STUDIO FOTO, ELEKTRONIK, PERALATAN & PERABOTAN KANTOR











"KEDAULATAN RAKYAT"

HALAMAN 7

LAYANI MASYARAKAT SESUAI REGULASI COVID-19

KAI Operasikan Kereta Api Luar Biasa

JAKARTA (KR) - PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengoperasikan Kereta Api Luar Biasa (KLB) untuk melayani masyarakat yang membutuhkan. Mereka adalah masyarakat yang sesuai Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 No 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Pada hari pertama pengoperasian enam perjalanan KLB, PT KAI melayani total 62 penumpang. Rinciannya, KLB KP/10476 Gambir -Surabaya Pasar Turi (27 penumpang), KLB KP/10477 Surabaya Pasar Turi -Gambir (12), KLB KP/10494 Bandung - Surabaya Pasar Turi (11), KLB KP/10497 Surabaya Pasar Turi -Bandung (1), KLB KP/10502 Gambir - Surabaya Pasar

Turi (8), dan KLB KP/10507 Surabaya Pasar Turi -Gambir (3).

"Beberapa rute KLB yang diminati penumpang adalah Gambir - Surabaya Pasar Turi, Gambir - Cirebon dan Gambir - Semarang Tawang," ujar Vice President Public Relations PT KAI Joni Martinus di Jakarta, Rabu (13/5).

Joni Martinus menegaskan, seluruh penumpang tersebut merupakan penumpang yang termasuk dalam masyarakat yang dikecualikan sesuai SE Gugus Tugas Covid-19.

"Meski okupansinya tidak tinggi, pengoperasian KLB ini ditujukan untuk melayani masyarakat yang memiliki kebutuhan mendesak dengan tetap menerapkan protokol pencegahan Covid-19 yang ketat," jelasnya.

Menurut Joni, total ada 96 personel yang bertugas pada Posko Satgas Covid-19 di berbagai stasiun untuk melakukan verifikasi berkas calon penumpang. Petugas berasal dari unsur internal KAI, Kemenhub, TNI, Polri, BPBD, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan masing-masing sudah diverifikasi berkasnya oleh Tim Satgas dapat langsung membeli tiket di loket stasiun keberangkatan penumpang," kata Joni.

Joni Martinus menambahkan, KAI menjual tiket mulai H-7 keberangkatan, dan tiket yang telah terjual sampai 12 Mei pukul 17.30 mencapai 89 tiket. "Terdapat 29 calon penumpang yang ditolak karena berkas yang diserahkan tidak lengkap," ungkapnya.

Joni kembali mengingatkan, pengoperasian KLB ini dikhususkan untuk masvarakat yang dikecualikan sesuai aturan Pemerintah, dan bukan diperuntukkan bagi Angkutan Mudik Lebaran 1441 H.

sibuk melakukan treacing kepada siapa per-

Bohong Sambungan hal 1

Pada Minggu (10/5) hasil swab keluar dan dinyatakan positif Covid-19. Kini petugas nah bertemu. Padahal, yang bersangkutan tidak melakukan isolasi.

Bupati Sleman, H Sri Purnomo berharap pentingnya disiplin masyarakat agar tidak terjadi penyebaran yang lebih luas. Jika diminta isolasi, maka harus dilaksanakan dengan (Jdm/Jon)-z

Terjangkit Sambungan hal 1

Menurut Yuri, sebaran kasus sembuh kasus Covid-19 sudah menyebar di seluruh dari 34 provinsi di Tanah Air, DKI Jakarta masih menjadi wilayah dengan sebaran pasien sembuh terbanyak 1.026 orang, disusul Sulawesi Selatan 288, Jawa Timur 274, Jawa Barat 237, Jawa Tengah 229, Bali 220, dan wilayah lain di Indonesia sehingga total mencapai 3.287 orang. "Kriteria pasien sembuh yang diakumulasikan tersebut adalah berdasarkan hasil uji laboratorium selama dua kali dan ketika pasien tidak ada lagi keluhan klinis," jelasnya.

Kemudian untuk jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) menjadi 256.299 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) menjadi 33.042 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi. Yurianto mengatakan

provinsi dan jumlah kabupaten/kota yang terdampak pada Rabu bertambah tiga menjadi 379.

"Keluarga adalah basis dari pembelajaran ini dan mari kita mulai biasakan pola hidup baru kita baik itu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta biasakan tidak mudah menyentuh wajah terutama saat tangan belum dicuci," katanya.

la juga menegaskan pentingnya kesadaran warga untuk mengenakan masker saat berada di luar rumah, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta menjaga jarak aman saat berinteraksi langsung dengan orang lain guna mencegah penularan Covid-19. (Ati/Ant)-d

Kasus Positif . Sambungan hal 1 daerah. "Penumpang yang (Imd)-d

Kepala Dinas Kesehatan Sleman Joko Hastaryo mengatakan, pelaksanaan rapid test hari kedua berjalan lancar. Bahkan ada warga yang dijadwalkan menjalani uji rapid test Selasa kemarin justru datang di hari kedua dan tetap dilayani. "Warga yang tidak datang sudah dihubungi melalui pesan WhatsApp dan bisa memanfaatkan pelaksanaan rapid test hari terakhir," jelas Joko Hastaryo.

Joko mengungkapkan, sebelum klaster Indogrosir ini, pihaknya masih bersikukuh mengharuskan rapid test reaktif dirawat di rumah sakit, meskipun secara fisik sehat. Namun melihat fakta di lapangan ada potensi ledakan kasus konfirm saat ini, padahal kapasitas kamar isolasi rumah sakit di Sleman saat ini sangat terbatas. Sehingga Pemerintah Kabupaten Sleman memilih Asrama Haji sebagai fasilitas kesehatan darurat untuk pelaksanaan karantina. "Proses karantina di Asrama Haji aturan atau protokolnya sangat ketat. Mirip isolasi nonkritikal di rumah sakit. Saat ini ada dokter yang ditempatkan di sana sebagai koordinator pelayanan selain penambahan tenaga perawat," tandas Joko.

Hingga saat ini, total kasus positif Covid-19 dari klaster Indogrosir yang merupakan warga Sleman sebanyak 8 orang. Mereka merupakan karyawan Indogrosir yang sudah dilakukan swab tenggorakan dan menunjukkan hasil positif Covid-19.

Sedangkan Bupati Sleman Drs Sri Purnomo MSi mengatakan, untuk warga ber-KTP di luar Sleman, seperti mahasiswa dari luar daerah yang sempat belanja di Indogrosir belum bisa diakomodasi untuk mengikuti rapid test di GOR Pangukan. Sekarang ini rapid test baru untuk

"Kami belum membuka rapid test bagi warga luar Sleman," kata Sri Purnomo.

Bagi mahasiswa atau masyarakat KTP luar Sleman yang sempat belanja di Indogrosir diimbau untuk isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Kemudian menerapkan PHBS, jaga jarak dan memakai masker.

"Kalau merasakan gejala Covid-19, supaya periksa ke puskesmas. Kemudian di pintu depan supaya jujur kepada petugas jika merasa-

kan gejala Covid-19. Nanti sama petugas akan

Sedangkan total tambahan kasus positif Covid-19 dari DIY, sebanyak 12 orang dengan 10 orang di antaranya dari klaster Indogrosir.

ditunjukkan melewati jalur khusus," ujarnya.

Juru Bicara (Jubir) Pemda DIY untuk penanganan virus Korona Berty Murtiningsih mengungkapkan, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di DIY bertambah 12 kasus baru lagi yang 10 kasus di antaranya merupakan klaster Indogrosir. Sehingga jumlah kasus positif Covid-19 di DIY adalah 181 kasus berdasarkan hasil laporan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit (RS) Rujukan Covid-19 DIY pada Rabu (13/5). Di samping itu, dilaporkan lima pasien positif Covid-19 sembuh dan tiga kematian Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di DIY.

Berty menuturkan 12 kasus positif Covid-19 yang baru dengan riwayatnya yaitu kasus 172 perempuan (19) warga Bantul terkait jemaah tablig, kasus 173 perempuan (29) warga Gunungkidul dari klaster Indogrosir, kasus 174 laki laki (7) warga Gunungkidul merupakan anak karyawan Indogrosir, kasus 175 laki laki (56) warga Gunungkidul terkait klaster Indogrosir dan kasus 176 laki laki (29) warga Sleman merupakan karyawan Indogrosir.

Selanjutnya kasus 177 laki laki (14) warga Sleman kontak dengan kasus positif dan enam kasus berikutnya merupakan karyawan Indogrosir yaitu kasus 178 laki laki (45) warga Sleman, kasus 179 laki laki (25) warga Sleman, kasus 180 laki laki (31) warga Sleman, kasus 181 laki laki (54) warga Kota Yogyakarta, kasus 182 laki laki (35) warqa Sleman dan kasus 183 perempuan (27) warga Gunungkidul.

" Jumlah kasus positif Covid-19 yang dinyatakan sembuh sebanyak 5 orang, sehingga jumlah kasus sembuh menjadi sebanyak 68 kasus. Kasus sembuh adalah kasus 51 laki laki (57) warga Sleman, kasus 107 perempuan (67) warga Gunungkidul, kasus 113 laki laki (33) warga Gunungkidul, kasus 114 perempuan (23) warga Gunungkidul dan kasus 117 perempuan (37) warga Gunungkidul," jelasnya.

(Sni/Aha/Ira/Ria)-d

Menurut Joko, saat menjalani karantina berjemur di bawah sinar matahari minimal selama 14 hari di rumah ada beberapa

terapi yang bisa dilakukan oleh OTG, untuk menjaga imunitas tubuh agar tetap sehat. Untuk terapi non farmakologis (tanpa obat) antara lain dengan selalu menggunakan masker setiap keluar kamar dan berinteraksi dengan anggota keluarga. Rajin-rajin cuci tangan memakai sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Menerapkan physical distancing, kamar tidur disendirikan/terpisah dan menerapkan etika batuk dengan benar.

Kemudian alat makan dan minum yang telah digunakan oleh OTG segera dicuci, 10-15 menit pukul 09.00-10.00 pagi, pakaian yang hendak dicuci di mesin cuci harus disendirikan.

"Segera sampaikan informasi ke FKTP jika suhu tubuh di atas 38 derajat," ujar Joko. Bagi orang yang hendak membersihkan kamar yang dihuni OTG, harus memakai APD minimal masker, sarung tangan, kacamata. Lantai kamar harus fektan

Sedangkan terapi famakologis (dengan obat) bagi OTG, bisa dengan mengonsumsi vitamin C atau multivamin untuk menjaga imunitas tubuh. Bagi OTG yang punya penyakit penyerta (komorbid) harus tetap konsultasi dengan dokter. Sedangkan bagi anggota keluarganya juga perlu menerapkan physical distancing dengan ketat, usahakan tidak menyentuh area wajah kalau tidak yakin bersih. Kemudian bersihkan gagang pintu yang sering dipegang oleh OTG dengan disinfektan.

lakukan OTG dengan ketat dan disiplin, karena jika tidak, OTG bisa menularkan virus ke anggota keluarga yang lain," pungkas Joko. (Dev)-z

. Sambungan hal 1

Jaminan Kesehatan.

Terhadap kebijakan ini, pengamat ekonomi Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah mengatakan tidak tepat menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi Covid-19. "Ini masalah yang sensitif, di tengah wabah, Pemerintah menaikkan (iuran). Walaupun Pemerintah punya argumentasi yang kuat pun, itu pasti akan ditanggapi miring," katanya di Jakarta, Rabu (13/5).

Direktur Riset Core itu menyadari jika penyesuaian juran tersebut sebagai bagian dari penyehatan keuangan BPJS Kesehatan termasuk memperbaiki jaring pengaman kesehatan. Namun, seharusnya Pemerintah dapat mempertimbangkan kenaikan iuran itu ketika melakukan reformasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang rencananya dilakukan 2021.

Pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 ingin mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial termasuk di bidang kesehatan. "Kenapa tidak sekalian saja tahun 2021? Jadi penyempurnaan jaring pengaman ke-

Perpres No 75 Tahun 2019 tentang sehatan ini bisa dilakukan tuntas, tidak dilakukan parsial seperti ini yang justru menimbulkan perspektif negatif," katanya.

> Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kenaikan iuran mulai Juli 2020 itu untuk menjaga keberlanjutan operasional BPJS Kesehatan. Meski terjadi kenaikan, namun Pemerintah tetap memberikan subsidi bagi peserta mandiri segmen PBPU dan BP khususnya pekerja mandiri Kelas III. "Untuk itu, ada iuran yang disubsidi Pemerintah, nah ini tetap yang diberikan subsidi. Untuk yang lain tentu diharapkan jadi iuran yang bisa menjalankan keberlanjutan operasi BPJS Kesehatan," kata Airlangga.

> Aggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay pun menyesalkan langkah Pemerintah mengeluarkan Perpres 64/ 2020. "Dalam Perpres itu, Pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan, Pemerintah terkesan tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Perpres 75/2019 yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan," kata Saleh.

> Padahal, menurut Saleh, masyarakat banyak yang berharap agar putusan MA itu

dapat dilaksanakan dan iuran tidak jadi dinaikkan. Menurutnya, mengeluarkan Perpres baru memang jauh lebih mudah dibandingkan melaksanakan putusan MA. Terkesan Pemerintah sengaja menaikkan iuran BPJS per 1 Juli 2020, dengan begitu ada masa Pemerintah melaksanakan putusan MA mengembalikan besaran iuran kepada jumlah sebelumnya yaitu Kelas I sebesar Rp 80.000, Kelas II Rp 51.000, dan Kelas III Rp 25.500.

"Artinya Pemerintah mematuhi putusan MA itu hanya 3 bulan, yaitu April, Mei, dan Juni, Setelah itu, iuran dinaikkan lagi dan uniknya lagi, iuran untuk Kelas III baru akan dinaikkan tahun 2021," ujarnya seraya menegaskan, saat ini bukan waktu yang tepat menaikkan iuran BPJS Kesehatan, karena masyarakat sedang kesulitan dan dipastikan banyak yang tidak sanggup untuk membayar iuran tersebut.

Padahal dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1 mengamanatkan, setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan, dan negara harus memberikan jaminan bagi terselenggarannya pelayanan kesehatan kepada masyarakat. (Ant)-d

Kerja

bagainya. Pekerjaan itu dilakukan secara bergotong-royong.

Gotong royong lebih dalam semangat kerja fisik, dikerjakan bersamasama, dengan basis komunalitas, untuk menghasilkan sesuatu. Jejak semangat gotong royong itu masih dihidupkan hingga sekarang, terutama di kampung-kampung. Jebakannya adalah, jika tidak ikut bergotong-royong secara fisik, dianggap tidak mau sesrawungan. Gotong-royong menjadi mekanisme eksklusi dan inklusi. Gotong royong dianggap sebagai parameter peranan sosial.

Kini, kehidupan berkembang kompleks dengan pembagian kerja yang lebih spesifik. Penduduk yang terus bertambah semakin membutuhkan kerja sama. Membangun jembatan, gedung besar, dan infrastruktur lainnya tidak bisa dikerjakan sekadar bergo-

rumah, kapal, atau jembatan, dan setong royong. Harus diatur agar terjadi satu kerja yang sinergis, dengan menejemen yang sistematis agar pekerjaan dapat selesai sesuai dengan target dan diharapkan. Dalam pekerjaan yang kompleks tersebut tidak bisa disebut sebagai gotong royong dalam pengertian awalnya.

Persoalan besar yang kita hadapi sekarang bukan lagi soal pembangunan dalam pengertian fisik, tetapi pembangunan sosial, pembangunan kesehatan, politik, ketahanan pangan, energi, mental, dan budaya. Pembangunan yang telah kita sebutkan tersebut sudah pasti tidak bisa dijawab dengan bergotong royong. Apanya yang digotongroyongi.

Yang juga tidak bisa diatasi dengan gotong-royong adalah mengatasi kemiskinan atau kriminalitas. Mungkin bergotong royong dalam pengertian teknis, misalnya iuran duit atau beras,

kemudian dibagi-bagikan ke yang miskin. Akan tetapi, cara itu jelas jauh dari cara mengatasi kemiskinan. Atau mengatasi kriminal dengan bergotongroyong membuat pos perondaan atau bersama-sama mengejar maling. Jauh dari cara-cara mengatasi kriminalitas.

Untuk mengatasi masalah itu dibutuhkan kerja sama. Kerja sama di sini adalah semua elemen sosial, politik, ekonomi, hukum, dan budaya bekerja dalam caranya masing-masing untuk menjawab persoalan bangsa. Dengan demikian, tidak ada yang dianggap tidak berpartisipasi dalam mengatasi persoalan tersebut. Semuanya berfungsi sesuai dengan profesi, bakat, dan keahliannya masing-masing.

Sayangnya, ideologi gotong-royong, sesuatu yang menginklusi dan mengekslusi dalam semangat sektoral, masih menjadi sandaran dalam mengerjakan sesuatu. Itulah sebab-

. Sambungan hal 1 nya, pekerja immaterrial dianggap tidak berpartisipasi dalam mengatasi kemiskinan. Yang berperan penting dalam kesehatan adalah para perawat dan dokter. Masalah kriminalitas adalah urusan polisi. Urusan politik adalah urusan politisi. Masalah agama adalah urusan tukang dakwah.

Sudah waktunya mengubah dasar ideologi gotong royong dengan ideologi kerja sama. Dalam kerja sama, tidak ada orang atau masyarakat yang tidak berperan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Semua ambil perannya masing-masing, sesuai dengan bidang pekerjaannya. Masyarakat di kampung-kampung, juga perlu mengubah ideologinya untuk tidak sekedar gotong-royong membuat polisi tidur. Tetapi lebih dari itu adalah bekerja-sama membuat kehidupan yang lebih produktif. (Penulis adalah Kepala Pusat Studi Kebudayaan UGM)-z

KURS JUAL RUPIAH TERHADAP DOLAR AS (8) 15.350 15.075 15.350 12/5 11/5 13/5

